



Pemkot Yogya Dorong Standardisasi Layanan Publik

■ Yulianingsih

Peningkatan pelayanan publik di Kota Yogyakarta juga mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berusaha meningkatkan pelayanan publik di semua lini di masyarakat. Bahkan sejak 2013, pemkot telah melakukan penilaian pada semua instansi di Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan pelayanan publik tersebut.

Penilaian dilakukan oleh tim khusus unit pelayanan publik Kota Yogyakarta. Penilaian didasarkan atas pelaksanaan standar pelayanan publik yang tertuang di Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemkot Yogyakarta memberikan penghargaan berupa Citra Pelayanan Prima (CPP) bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun instansi yang telah melaksanakan standarisasi pelayanan publik di instansinya.

Tahun lalu, pemkot memberikan CPP pada Dinas Perizinan, Kecamatan Danurejan, SMAN 3 Yogyakarta, Puskesmas Umbulharjo 2, Puskesmas Jetis, serta UPT Taman Pintar Yogyakarta. Tahun ini, CPP diberikan pada enam instansi yang telah memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU tersebut.

Keenam instansi adalah Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mergangsan, dan Dinas Pengelolaan Pasar. "Kita telah melakukan reformasi birokrasi sejak 2012 lalu dan semua berjalan on the track. Sejak 2013, kita terus meningkatkan pelayanan publik sesuai standar UU pelayanan publik dan semua berjalan dengan baik dan mengembirakan," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Peningkatan layanan publik di Kota Yogyakarta juga mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 12 SKPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta memperoleh predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU No 25 Tahun 2009.

Ke-12 instansi adalah Dinas Pe-

ngelolaan Pasar, Dinasakertrans, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinkapil), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), Dinas Perhubungan, PDAM Tirta Maria, Dinas Perizinan, dan RS Jogjakarta.

Penghargaan diserahkan oleh Menkopolkukam Djoko Suyanto kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono, dalam acara peringatan lima tahun berlakunya UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada 12 SKPD tersebut. Semoga pencapaian ini tidak hanya berhenti pada penghargaan ini namun harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga memberikan inspirasi bagi SKPD lainnya," kata Haryadi.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras tim yang solid dan mencerminkan sikap semangat *segoro amarto* (semangat gotong royong *agawe majune Ngayogyakarta*). Pasalnya, tanpa dukungan tim yang solid dan semangat yang tinggi maka pelayanan yang optimal dan berprestasi sulit diwujudkan.

Terstandar sesuai UU

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono, mengatakan 12 instansi yang memperoleh penghargaan itu berhasil mendapatkan nilai di atas 800 atau sudah masuk ke dalam zona hijau. Nilai tersebut berasal dari penilaian yang dilakukan secara tertutup dan melakukan intervensi terfokus dengan 44 komponen penilaian.

"Standar pelayanan publik wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi di Pemkot Yogyakarta. Setiap karyawan di Pemkot Yogyakarta wajib dan harus tahu serta mematuhi dan melaksanakan standar pelayanan publik yang ada pada UU No 25 Tahun

2009," ujarnya.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono, menjelaskan penilaian kepatuhan layanan publik yang dilakukan 12 instansi di Kota Yogyakarta ini dilakukan ORI secara independen. "ORI sendiri yang menentukan instansinya untuk dinilai dan hasilnya mengembirakan," katanya.

Diakui, jumlah instansi di Kota Yogyakarta sebanyak 250 unit kerja. Ke depan semua instansi itu akan dinilai agar memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU No 25 Tahun 2009 itu. Pihaknya telah menargetkan tahun ini sebagian besar instansi sudah masuk zona hijau atau sudah menerapkan standarisasi layanan publik.

"Sisanya kita targetkan pada 2015 semua unit kerja sudah masuk zona hijau dan semua layanan publik di Kota Yogyakarta terstandar sesuai UU," katanya.

Pihaknya telah melakukan perbaikan kinerja dari visi, misi, prasarana, sistem prosedur, hingga sumber daya manusia di semua unit kerja. Bahkan produktivitas juga menjadi acuan tersendiri dalam pelaksanaan standar layanan publik tersebut. Diharapkan dengan semangat *segoro amarto* target ini tercapai dengan bagus.

Dari sisi sistem dan prasarana, katanya, salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada publik yang akan dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem informasi pelayanan publik. Sistem tersebut diharapkan akan rampung pada 2014 ini. "Diharapkan 2014 sudah rampung terkait dengan sistem informasi pelayanan publik Kota Yogyakarta," katanya.

Dalam sistem itu, nantinya tidak hanya SKPD saja yang menampilkan sistem infomasinya, namun juga unit dan instansi pelayanan lain termasuk di antaranya sekolah-sekolah. Sistem informasi tersebut nantinya akan masuk dalam sub domain website Pemerintah Kota Yogyakarta. ■ edi.yusuf.assidiq

Ig. Trihasnato, S.Sos, MM

NIP. 19690723 199603 1 005

-bag. organisasi
 & postif & blagera

untuk di ketanmi



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005